



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA KERJA

TAHUN 2022

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

-
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. lokasi; dan
 - d. kelompok sasaran,yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2022

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	180.688.255.100,00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	309.356.467.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	26.154.465.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	19.944.141.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	11.790.924.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	6.046.007.000,00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	8.052.470.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	9.046.389.300,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	30.239.285.375,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	5.468.754.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	11.969.277.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16.845.047.782,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	13.588.888.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6.883.397.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	28.051.629.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	6.732.631.000,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	10.032.127.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	32.612.271.000,00
19	Sekretariat DPRD Kota Magelang	30.784.953.000,00
20	Sekretariat Daerah	42.179.996.000,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.762.462.000,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	23.973.153.000,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	18.895.492.000,00
24	Inspektorat Kota Magelang	8.228.302.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	11.103.595.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	30.877.012.000,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	24.635.591.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.969.061.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
	TOTAL	951.912.043.057,00

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2.Landasan Hukum3

1.3. Maksud dan Tujuan5

1.4. Sistematika Penulisan5

BAB II.....7

HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 20217

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 dan Capaian Renstra
BPKAD Kota Magelang.....7

BAB III52

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....52

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....52

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang52

3.3. Program dan Kegiatan58

BAB IV73

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH73

BAB V88

PENUTUP.....88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Penetapan APBD Kota Magelang.....	8
Tabel 2.1.2	Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan BPKAD Kota Magelang.....	9
Tabel 2.1.3	Capaian TPB Urusan Keuangan.....	10
Tabel 2.1.4	Kinerja Program yang Memberikan Kontribusi terhadap Capaian Sasaran.....	10
Tabel 2.1.5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang s.d Triwulan II Tahun 2021.....	14
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang.....	24
Tabel 2.4.1.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 dan 2020.....	32
Tabel 2.4.1.2	Target Pendapatan Kota Magelang Tahun 2021serta Proyeksi Pendapatan Kota Magelang Tahun 2022 dan 2023.....	33
Tabel 2.4.2.1	Realisasi dan Persentase Belanja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 – 2020.....	35
Tabel 2.4.2.2	Target Belanja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022 dan 2023.....	35
Tabel 2.4.2.3	Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Magelang	37
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Makro Nasional.....	52
Tabel 3.1.2	Capaian Indikator Makro Jawa Tengah.....	53
Tabel 3.1.3	Identifikasi Isu-isu Strategis Pelayanan OPD.....	53
Tabel 3.2.1	Penjelasan Visi.....	56
Tabel 3.2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	56
Tabel 3.2.3	Indikator Kinerja Program	58
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Magelang.....	61
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun RKPD Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan KUA-PAS yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2022. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pengelolaan keuangan dan aset daerah tahunan Pemerintah Kota Magelang dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal

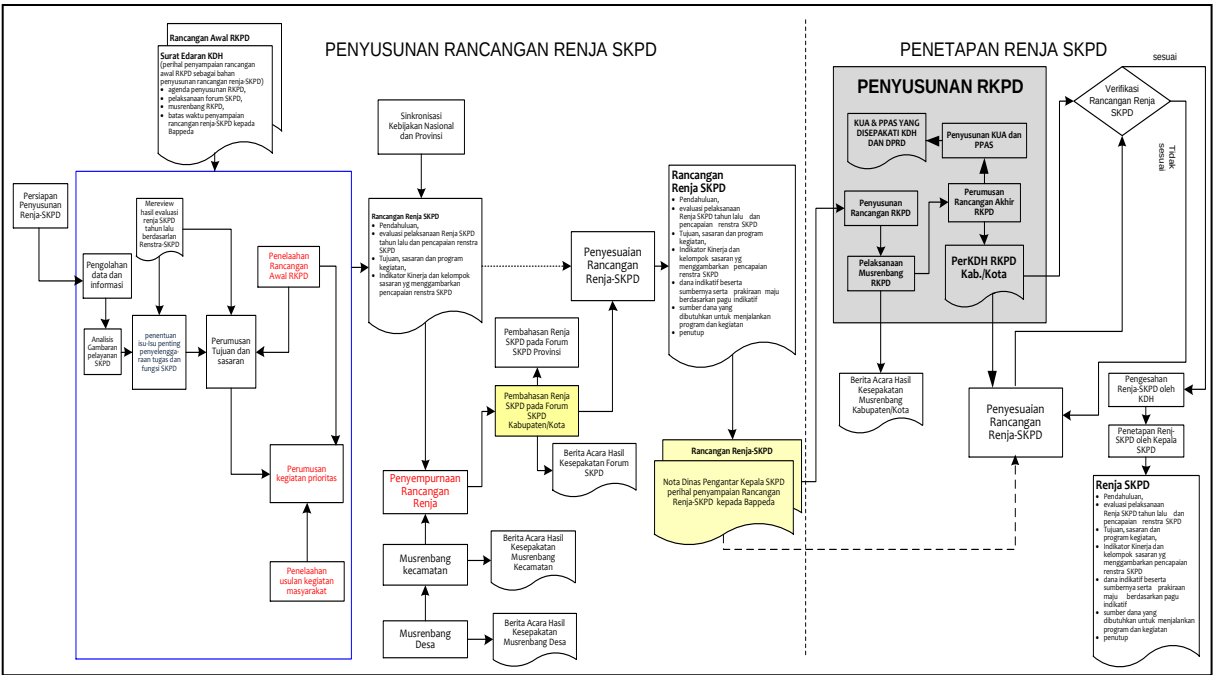
penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPKAD Kota Magelang Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
- b. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021;
- c. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;
- d. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Keistimewaan penyusunan Renja Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang adalah dikarenakan disusun pada masa transisi antara pelaksanaan tahun terakhir Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan juga disusun secara paralel dengan penyusunan Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Di samping itu Renja Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang disusun ketika pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia dan dunia yang dampaknya masih terasa di tahun 2021. Memperhatikan hal tersebut maka Renja BPKAD Kota Magelang disusun dengan mengakomodir Visi Misi Walikota terpilih yaitu MAJU, SEHAT dan BAHAGIA yang akan dijabarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dimana RKPD Tahun 2022 merupakan perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Tahun perencanaan 2021 adalah tahun puncak RPJMD Kota Magelang periode tahun 2016-2021 yang merupakan masa transisi tahap III ke tahap IV RPJPD yang dijabarkan dalam RPJMD 2021-2026. Adapun Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2020. Rencana kerja BPKAD Kota Magelang ini menjadi acuan perangkat

daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaranya tahun 2022. Rancangan Akhir Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2022 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKAD KOTA Magelang tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 yang akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) BPKAD Kota Magelang yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2022. Adapun Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja OPD seperti yang kami Gambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Penyusunan Rancangan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;
21. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 050.23/ /440 Tahun 2021 tanggal 6 agustus 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2022 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Tujuan dibuatnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPKAD;
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di BPKAD.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD Tahun 2022 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala BPKAD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut dinyatakan bahwa BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar tugas tersebut maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah; pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah; pelayanan dalam rangka proses pencairan dana; pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah; serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Dalam pengelolaan keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah melakukan siklus utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah yang baik di dalam setiap siklus utama tersebut, haruslah memperhatikan 3 (tiga) pilar yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Ketiga pilar tersebut digunakan untuk mewujudkan good governance pada BPKAD Kota Magelang khususnya dan Pemerintah Kota Magelang pada umumnya. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBD. Proses perencanaan dan penganggaran di Kota Magelang telah dilakukan

tepat waktu, walaupun ada proses penyampaian KUA ke DPRD yang mengalami keterlambatan beberapa kali dalam kurun waktu dari tahun 2016-2021. Namun keterlambatan penyampaian KUA tidak mempengaruhi proses penetapan APBD, sehingga Pemerintah Kota Magelang tetap dapat menetapkan APBD pada bulan Desember tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.1 Penetapan APBD Kota Magelang

NO	TAHUN	PENYAMPAIAN KUA/PPAS	KET	PERDA APBD	TANGGAL	KET
1	2015	na	-	Perda Nomor 8 Tahun 2014	29 Desember 2014	Tepat Waktu
2	2016	na	-	Perda Nomor 9 Tahun 2015	21 Desember 2015	Tepat Waktu
3	2017	10 Juni 2016	Tepat Waktu	Perda Nomor 14 Tahun 2016	23 Desember 2016	Tepat Waktu
4	2018	13 Juni 2017	Tepat Waktu	Perda Nomor 13 Tahun 2017	20 Desember 2017	Tepat Waktu
5	2019	20 Juli 2018	Tidak Tepat Waktu	Perda Nomor 11 Tahun 2018	14 Desember 2018	Tepat Waktu
6	2020	12 Juli 2019	Tepat Waktu	Perda Nomor 12 Tahun 2019	13 Desember 2019	Tepat Waktu
7	2021	7 Agustus 2020	Tidak Tepat Waktu	Perda Nomor 6 Tahun 2020	18 Desember 2020	Tepat Waktu

Sumber: Bidang Anggaran, BPKAD Tahun 2021

Sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejak asas desentralisasi dilaksanakan, Pemerintah Kota Magelang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga upaya positif untuk peningkatan kemandirian daerah. Pemerintah Kota Magelang harus berupaya menggali potensi daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan di daerah dengan meningkatkan kemandirian keuangannya. Tingkat kemandirian keuangan daerah terlihat dari Kinerja Makro Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2
Kinerja Makro Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Kota Magelang

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	27.83	30.70	32.76	35.22	36.17
2	Derajat Otonomi Fiskal	21.77	23.49	37.96	25.29	26.56
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	75.00	66.29	62.82	66.04	67.01
4	Nilai Opini BPK terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Indikator kinerja makro fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan terdiri dari 4 (empat) indikator. Pada 3 (tiga) indikator awal, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat, menunjukkan tingkat kemampuan Kota Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pemasukan yang berasal dari sumber lain. Angka realisasi dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka lebih tinggi daripada target yaitu pada 36.17% atau menunjukkan pola hubungan konsultatif. Tren indikator ini, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang mengalami peningkatan kemampuan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja indikator Derajat Otonomi Fiskal, atau sering disebut juga dengan Desentralisasi Otonomi Fiskal, walaupun belum mampu memenuhi target, namun tren meningkat dari tahun ke tahun. Prosentase peningkatan PAD belum seimbang dengan prosentase peningkatan pendapatan. Namun tren positif sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain capaian kinerja indikator Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat mengalami tren menurun. Pada tahun 2016 berada pada kisaran 66% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 67,01%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Magelang terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi mulai berkurang.

Jadi secara umum tingkat kemandirian Pemerintah Kota Magelang yang ditunjukkan melalui 3 indikator tersebut di tahun 2020 masih berada pada posisi yang kurang lebih sama bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini karena di tahun 2020 tingkat perolehan PAD Kota Magelang dipengaruhi oleh pandemi COVID 19. Sehingga capaian

3 indikator dimaksud menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kota Magelang untuk membiayai pembangunan dan menyelenggarakan layanan publik terhadap dana transfer dari pemerintah pusat hingga tahun 2020 masih berada pada kategori RENDAH.

Indikator terakhir, yaitu indikator nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2016 dan opini WTP ini dapat dipertahankan hingga tahun 2020. Walaupun demikian, masih ada catatan atas LKPD yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Magelang yaitu terkait aset. Namun secara umum, perolehan opini WTP bagi Pemerintah Kota Magelang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang sudah baik.

Dalam urusan ini, juga terdapat 2 indikator terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Capaian TPB Urusan Keuangan

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020
Tujuan 16	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	85,77%	69,64%
	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.4
Kinerja Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Penunjang Keuangan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	- Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah	53.53	74.36	75.24	76.18	77.91
	- Barang milik daerah yang didayagunakan	100	100	100	100	100
	- Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	97.83	100	100	100	100
	- Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	97.83	100	100	100	100
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
	- Persentase Pertumbuhan PAD	18.02	6.01	6.99	9.47	6.16
	- Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100	100	100	100	100

3	Program Peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	- Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	11.79	13.36	13.72	14.78	12.38
	- Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	3.02	2.67	2.26	3.33	1.78

Sumber : BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Indikator kinerja program pada fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan yang memberikan kontribusi terhadap capaian sasaran RPJMD terdiri dari 8 (delapan) indikator yang terbagi ke dalam 3 (tiga) program. Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat 4 (empat) indikator yaitu Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang, Pelaporan Barang Milik Daerah yang Didayagunakan, Pelaporan Semesteran BMD yang tepat waktu, dan Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu. Tren keempat indikator pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPKAD Kota Magelang dalam usaha melaksanakan pengelolaan asset daerah telah dilaksanakan secara baik.

Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pertumbuhan PAD dan Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Meski secara capaian dari tahun ke tahun indikator Persentase Pertumbuhan PAD mengalami penurunan yang fluktuatif namun untuk PAD sendiri trendnya selalu meningkat selama 5 tahun berturut-turut kecuali pada tahun 2020. Realita di atas disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah : 1) PAD saat ini sudah mendekati potensi yang ada sehingga akan menurunkan laju pertumbuhan PAD; 2) Kondisi pandemic Covid 19 sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh masyarakat terutama Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. Hal ini sangat berdampak pada penerimaan PAD Pemerintah Kota Magelang. Sedangkan untuk indikator Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP telah on the track, bahkan melebihi dari target setiap tahunnya. Setiap perangkat daerah pada Pemerintah Kota Magelang telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dua indikator pada Program Peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD. Capaian kinerja indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan tren yang positif kecuali pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena situasi dunia termasuk Indonesia yang sedang terkena wabah pandemi penyakit Covid-19. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD mengalami tren yang menurun, hal ini disebabkan beberapa faktor yang terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi perubahan lingkungan serta perubahan regulasi yang menyebabkan penurunan angka capaian indikator tersebut, di antaranya adalah kondisi pandemi Covid-

19 sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh wajib retribusi. Hal ini berdampak pada penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Kota Magelang. Sebagai contoh adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Dengan adanya pemberlakuan social distancing maka banyak orang yang lebih memilih di rumah dan tidak bepergian, banyak toko maupun market place yang berada di pinggir jalan yang tutup, sehingga menurunkan potensi pendapatan dari retribusi parkir ini.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 berdasarkan laporan kinerja dan juga realisasi anggarannya adalah sebagai berikut ;

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran sesuai yang direncanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan dari 121 kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot dengan target keluaran Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, hal ini dikarenakan Pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan karena dinamika kesepakatan yang belum dapat ditindaklanjuti.
 - b. Kegiatan Penyelamatan Aset Daerah. Kegiatan ini dalam rangka pengamanan aset baik fisik, administratif, maupun yuridis dan diutamakan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah yang dalam penguasaan atau rawan dikuasai oleh pihak lain. Belum selesainya permasalahan Eks HGB 149/Kramat dengan PT. BRA, sehingga rencana pelaksanaan pemagaran tanah milik Pemerintah Kota Magelang belum bisa direalisasikan pada tahun 2020.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran sesuai yang direncanakan sebanyak 119 kegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi PBB
 - b. Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB
 - c. Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
 - d. Penghapusan Aset
4. Dari 7 (tujuh) program dan 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2020, prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu mencapai sebesar 67,26% dengan 119 (seratus sembilan belas) kegiatan, menurun dibandingkan capaian pada tahun 2019 yang sebesar 97,70%. Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 16.698.842.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.231.884.031,-. Sedangkan realisasi fisik tahun 2020 adalah 98,25%, meningkat di bandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar 92,98%.

5. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak terdapat di dalam Renstra namun terdapat dalam Renja yaitu Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, Kegiatan Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perda tentang Penyertaan Modal, Kegiatan Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020 menyesuaikan dengan kondisi pemerintahan serta regulasi yang ada.
6. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan dari kegiatan tersebut masih dalam proses dan belum selesai sepenuhnya. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut. Terjadinya pandemi COVID-19 secara global dan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Non Alam, berdampak pada aktifitas perekonomian yang mengalami gejolak sehingga berdampak pula pada berbagai sektor termasuk aktifitas/kegiatan pada pemerintahan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1.5 berikut :

TABEL 2.1.5
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2021*)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 *)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11	12
2.18 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	50%	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar OPD (Jenis)	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2 jenis	50,00%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa rekening telepon, air, listrik, dan internet untuk kelancaran tugas (Jenis)	5	jenis	5	jenis	5	jenis	5	jenis	100%	5 jenis	41,09%	5 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional. (unit)	50	kendaraan	65	kendaraan	50	kendaraan	50	kendaraan	100%	59 unit	37,45%	59 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	43	orang	12	Bulan	43	orang	43	orang	100%	40 orang	76,06%	40 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kerbersihan yang tersedia	22	jenis/item	22	jenis	22	jenis/item	22	jenis/item	100%	22 jenis/item	61,94%	22 jenis/item	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis atk yang tersedia	48	jenis	48	jenis	48	jenis	48	jenis	100%	48 jenis	99,53%	48 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang yang dicetak	15	jenis	15	jenis	15	jenis	15	jenis	100%	15 jenis	93,81%	15 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis peralatan penerangan gedung yang tersedia	17	jenis	17	jenis	17	jenis	17	jenis	100%	17 jenis	90,83%	17 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	surat kabar	3	surat kabar	3	jenis	3	jenis	100%	3 jenis	55,48%	3 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis logistik kantor yang terpenuhi	2	jenis	2	jenis	3	jenis	3	jenis	100%	2 jenis	52,35%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (karyawan)	57	karyawan	12	Bulan	57	karyawan	57	karyawan	100%	80 karyawan	75,40%	80 karyawan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kefgiatan koordinasi antar daerah	76	kegiatan	12	Bulan	12	bulan	12	bulan	100%	76 kegiatan	34,79%	76 kegiatan	100%

4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	jumlah tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan yang tersedia	8	orang	9	Orang	7	orang	7	orang	100%	8 orang	55,99%	8 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah data administrasi yang dikelola	57	file	82	File	57	file	57	file	100%	57 file	61,00%	57 file	100%
4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (%)	100	%	100	%	100	%	100	%	100%			100%	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan kantor yang terpenuhi	3	Jenis	3	Jenis		Jenis		Jenis	100%	2 unit	100%	3 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor milik OPD yang terpelihara (Unit)	1	unit	1	Unit	4	unit	4	unit	100%	1 unit	79,46%	1 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50	unit	70	Unit	50	unit	50	unit	100%	50 unit	95,00%	50 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7	jenis	41	Unit	7	jenis	7	jenis	100%	7 jenis	73,00%	7 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang terpelihara	6	jenis	8	Jenis	6	jenis	6	jenis	100%	6 jenis	73,74%	6 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jenis mebeleur kantor yang terpelihara	0	buah	29	Buah	27	buah	27	buah	100%	27 buah	0%	0 buah	0%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bagian gedung kantor yang direbilitasi	3	unit	237,00	m2	0	unit	0	unit	0%	0 unit	0%	0 unit	0%
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya kegiatan perkantoran													
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja skpd	12	laporan	12	Dokumen	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	98,21%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jenis laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	2	jenis laporan	2	Jenis	2	jenis laporan	2	jenis laporan	100%	2 jenis laporan	91,48%	2 jenis laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja penetapan dan renja perubahan	2	jenis dokumen	2	Dokumen	2	jenis dokumen	2	jenis dokumen	100%	2 jenis dokumen	93,84%	2 jenis dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	45,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra OPD	1	dokumen				dokumen		dokumen	100%	1 dokumen	50%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500	berkas	1800	berkas	1500	berkas	1500	berkas	100%	1500 berkas	57,00%	1500 berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	97,62%	1 dokumen	100%

	Pemerintah (LKj IP) OPD														
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel													
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	jumlah pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Dokumen	75	Buku	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	jumlah Penetapan Perda tentang APBD	1	raperda	4	dokumen	1	raperda	1	raperda	100%	1 raperda	1,43%	1 raperda	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	jumlah Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD	3	dokumen	3	dokume	3	dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	0,00%	3 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	jumlah Penetapan Perda tentang Perubahan APBD	1	raperda	4	dokumen	1	raperda	1	raperda	100%	1 raperda	0,08%	1 raperda	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD	2	raperwal	4	dokumen	2	raperwal	2	raperwal	100%	2 raperwal	59,02%	2 raperwal	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda tentang pertanggungjawaban APBD	1	Raperda	1	Perda	1	Raperda	1	Raperda	100%	1 Raperda	94,71%	1 Raperda	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban APB	1	Raperwal	1	Perwal	1	Raperwal	1	Raperwal	100%	1 Raperwal	94,73%	1 Raperwal	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi	1	aplikasi	2	aplikasi		aplikasi		aplikasi	100%	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	jumlah laporan posisi kas daerah kepada Kementrian Keuangan RI setiap bulan	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	56,00%	12 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen rancangan KUA	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	37,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen Rancangan PPAS	0	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0%	0 dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen rancangan Perubahan KUA	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen Rancangan Perubahan PPAS	0	dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	0 dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	jumlah DPA SKPD yang diteliti	29	OPD	29	Opd	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	jumlah DPA SKPD yang disyahkan	29	OPD	29	Opd	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	51,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPP, Laporan Sertifikasi, dan Laporan Rekonsiliasi SKPD	6	Laporan	500	Berkas	6	Laporan	6	Laporan	100%	6 Laporan	75,00%	6 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Jumlah Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang Sesuai dengan Ketentuan	5000	SP2D	3000	SP2D	5000	SP2D	5000	SP2D	100%	5000 SP2D	59,20%	5000 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Jumlah Kegiatan penerbitan Surat Pengesahan Dana (SPD)	9	kegiatan	170	SP2D	9	kegiatan	9	kegiatan	100%	9 kegiatan	66,28%	9 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	720	dokumen	12	dokumen	720	dokumen	720	dokumen	100%	720 dokumen	57,12%	720 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan keuangan OPD yang diteliti dan diasistensi	720	laporan	348	Laporan	72	laporan	72	laporan	100%	720 laporan	58,00%	720 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	Jumlah SPM yang diterbitkan	0	SPM	1800	SPM	1700	SPM	1700	SPM	100%	1700 SPM	99,97%	0 SPM	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Jumlah laporan verifikasi dan pergeseran anggaran kas	29	OPD	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	75,92%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12	laporan	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	88,85%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	jumlah Laporan informasi penganggaran daerah	0	laporan	2	Laporan	0	laporan	0	laporan	0%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	Jumlah kegiatan penyusunan anggaran kas	9	Kegiatan	170	Dokumen	9	Kegiatan	9	Kegiatan	100%	9 Kegiatan	0,00%	9 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29	OPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	50%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	jumlah DPPA SKPD yang disyahkan	29	OPD	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah Penatausahaan Permohonan Bantuan dan Tak Terduga	1031	Berkas	2500	berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	100%	1031 Berkas	70,00%	1031 Berkas	30%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah yang akuntabel	0	laporan	12	laporan	0	laporan	0	laporan	0%	0 laporan	0%	0 laporan	0%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	12	Laporan	12	laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	79,46%	12 Laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	jumlah Laporan bulanan PPKD	0	laporan	12	Laporan	0	laporan	0	laporan	0%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Jumlah sekolah dengan bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74	sekolah	74	sekolah	74	sekolah	74	sekolah	100%	74 sekolah	61,00%	74 sekolah	54%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop	0	pegawai	73	pegawai	60	pegawai	60	pegawai	100%	0 pegawai	%	0 pegawai	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120	orang	100	Orang	120	orang	120	orang	100%	120 orang	54,92%	120 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan)	0	SP2D	1400	SP2D	1.100	SP2D	1.100	SP2D	100%	0 SP2D	%	0 SP2D	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	81,00%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Kebutuhan (Berkas)	1031	Berkas	1500	Berkas	1031	Berkas	1031	Berkas	100%	1031 Berkas	69,60%	1031 Berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Jumlah laporan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D	0	Jenis Dokumen	4	Jenis dokumen	4	Jenis Dokumen	4	Jenis Dokumen	100%	0 Jenis Dokumen	0%	0 Jenis Dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan	0	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	Daftar Gaji OPD sebagai Dasar Penerbitan SP2D	470	Daftar Gaji	1400	SP2D	470	Daftar Gaji	470	Daftar Gaji	100%	470 Daftar Gaji	53,73%	470 Daftar Gaji	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2	kegiatan			2	kegiatan	2	kegiatan	100%	2 kegiatan	100,00 %	2 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.	0	laporan	1	laporan	6	laporan	6	laporan	100%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	0	wajib pajak	350	Wajib pajak	300	wajib pajak	300	wajib pajak	100%	0 wajib pajak	0%	0 wajib pajak	0%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	30	SK	50	Sk	50	SK	50	SK	100%	30 SK	64,99%	30 SK	100%

	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB (Laporan)	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12 Laporan	65,09%	12 Laporan	100%
	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang terverifikasi dan terdistribusi (SPPT)	36200	SPPT	36200	SPPT	36200	SPPT	36200	SPPT	100%	36200 SPPT	97,06%	36200 SPPT	100%
	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan Pendapatan Daerah	jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	60,04%	12 laporan	100%
\	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek PBB yang telah terdigitalisasi dan termuktahirkan dengan kondisi terupdate di lapangan (Peta)	1	peta	1	peta	1	peta	1	peta	100%	1 peta	75,00%	1 peta	100%
	Implementasi tapping box	jumlah laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	69,20%	12 laporan	100%
	Penatausahaan administrasi pemungutan pajak reklame dan pajak air tanah	Jumlah laporan pencapaian target pajak reklame dan PAT	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	62,87%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkat dan teradministrasinya pengelolaan Barang Milik Daerah													
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Limit Barang Milik Daerah yang akan dipindahtanganan	2	kegiatan	1	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	2 kegiatan	12,42%	2 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	4	kegiatan	1	tahun	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	39,41%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil penelitian penjualan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah	4	Kegiatan	3	kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	4 Kegiatan	47,29%	4 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Sarana olahraga Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun.	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	100%	2 lapangan	43,53%	2 lapangan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun	4	gedung kantor	3	unit	4	gedung kantor	4	gedung kantor	100%	4 gedung kantor	41,37%	4 gedung kantor	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Data BMD yang mutakhir.	12	kegiatan	12	bulan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	12 kegiatan	70%	12 keg	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	Jumlah pekerjaan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4	paket			4	paket	4	paket	100%	4 paket	32,65%	4 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6	jenis laporan	6	jenis	6	jenis laporan	6	jenis laporan	100%	6 jenis laporan	61,00%	6 jenis laporan	100%

4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan asset daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dijual	3	paket	5	paket	3	paket	3	paket	100%	3 paket	46,40%	3 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan asset daerah	jumlah laporan penyelamatan aset	0	Laporan	12	bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	Jumlah kegiatan penaksiran Barang Milik Daerah	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	41,35%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD kepada petugas pengelola BMD OPD.	4	kegiatan	4	kegiatan	4	Laporan kegiatan	4	Laporan kegiatan	100%	185 orang; 4 Laporan	46,00%	185 orang; 4 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai kategori.	3	kegiatan	3	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	3 kegiatan	36,32%	3 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	10	dokumen	2	dokumen	10	dokumen	10	dokumen	100%	10 dokumen	47,26%	10 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	jumlah kegiatan pemberian hak atas tanah negara	0	Kegiatan	12	Laporan kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot.	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 dokumen	1,69%	12 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Laporan data tanah milik Pemerintah	2	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	0 laporan	0,00%	2 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Jumlah bidang batas fisik tanah	0	bidang	2	bidang	2	bidang	2	bidang	100%	0 bidang	0%	0 bidang	0%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Perpanjangan 10 STNK kendaraan dan KIR 5 bus	18	unit			18	unit	18	unit	100%	18 unit	16,42%	18 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB untuk gedung kantor/Rumdin/Mess.	20	SPPT	6	SPPT	20	SPPT	20	SPPT	100%	20 SPPT	0,00%	20 SPPT	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Jumlah pembayaran PBB tanah milik Pemda (Bidang)	223	bidang	198	tanah	223	bidang	223	bidang	100%	223 bidang	0,00%	223 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Rumah dinas dan mess yang terpelihara selama 1 tahun.	5	bangunan	6	rumdin	6	rumah dinas	6	rumah dinas	100%	5 bangunan	29,39%	5 bangunan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10	unit	17	unit	18	unit	18	unit	100%	10 unit	33,64%	10 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	jumlah Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan	0	laporan	4	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	0 laporan	0%	0 laporan	0%
	Penyediaan jasa pengelolaan Barang Milik Daerah	Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	bulan	13	orang	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	45,53%	12 bulan	100%

	Penatan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	jumlah Penatagunaan Tanah Pemkot dan Tersedianya Data Tanah Pemkot yang Akurat	0	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	3	Kecamatan	100%	0 Kecamatan	0%	0 Kecamatan	0%
	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kodefikasi Barang	jumlah Perwal tentang Kodefikasi Barang yang tersedia	0	perwal	1	Perwal	0	perwal	0	perwal	0%	0 perwal	0%	0 perwal	0%
	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Tanah untuk bangunan tempat kerja	1	lokasi	0	Lokasi	1	lokasi	0	Lokasi	0%	1 lokasi	0%	1 lokasi	100%

Keterangan : *) Data sampai dengan Triwulan II 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang

Renja Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang disusun pada masa transisi antara pelaksanaan tahun terakhir Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan juga disusun secara paralel dengan penyusunan Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Renja 2022 berdasarkan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2022 yang mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama, berdasarkan identifikasi masalah, mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2020 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1.5 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Wujud pelayanan BPKAD Kota Magelang dalam menunjang kinerja Fungsi Penunjang Keuangan adalah pelayanan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Inovasi-inovasi baru senantiasa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut. Inovasi tersebut diharapkan akan memudahkan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat termasuk juga wajib pajak. Inovasi yang dilakukan :

1. Aplikasi terkait BPHTB yaitu SiBahenol
2. Aplikasi terkait retribusi online yaitu SiRetro
3. Aplikasi terkait dengan PAD online yaitu Pak Dewo
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mitra melalui asistensi dan konsultasi Ruang Pojok Pintar
5. Penerapan IPAD (Integrasi Pendapatan Asli Daerah) dan sinkronisasi dengan sistem CMS (Cash Manajemen System) dari Bank Jateng
6. Pemasangan tapping box untuk memonitoring data hasil usaha WP apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh WP
7. Penerapan e-tax dan e-retribusi untuk mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi melalui sistem online
8. Penerapan Peta Digital guna memperoleh informasi detail tiap obyek pajak di Kota Magelang dengan Sistem Informasi Geografis dengan kondisi riil yang ada serta didapatkan data terbaru tentang PBB P2 Kota Magelang

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut 10 (sepuluh) daftar pajak daerah yang menjadi tanggung jawab BPKAD Kota Magelang, yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Adapun pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel 2.2.1 berikut:

TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2019	2020	2021	2022	2020	2021 *)	2022	2023	
1	Derajat otonomi fiskal		31,96%	33,88%	35,62%	35,62%	26,56%	23,92%	35,62%	35,62%	
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat		67,45%	65,79%	63,65%	63,65%	67,01%	66,07%	63,65%	63,65%	
3	Rasio pajak daerah terhadap PAD		12,33%	12,15%	12%	12%	12,38%	14,91%	12%	12%	
4	Rasio retribusi daerah terhadap PAD		3,33%	3,10%	2,91%	2,91%	1,78%	2,80%	2,91%	2,91%	
5	Prosentase pertumbuhan PAD		12,83%	11,37%	10,21%	10,21%	6,16%	-28.19%	10,21%	10,21%	
6	Penerapan ASB dalam proses penganggaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persetujuan Raperda tentang APBD		Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	14 September 2020	-	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	
8	Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan		Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	4 September 2020	-	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	
9	Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10	Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan		5	1	1	1	1	-	1	1	
11	Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP		87%	90%	90%	90%	100%	100%	90%	90%	
12	Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD		Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	27-Jul-20	-	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	
13	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang		70%	100%	80%	80%	77,91%	84,33%	80%	80%	
14	Barang Milik yang didayagunakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Magelang

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Magelang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara regulasi, rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi kepentingan lokal, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada prinsipnya Perda ini meratifikasi secara mutatis mutandis PP Nomor 12 Tahun 2019, namun terdapat beberapa detil yang pada intinya menyesuaikan kepentingan daerah tanpa melanggar ketentuan regulatif peraturan di atasnya.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD

yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk pemyertaan modal, pembentukan dan acadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perarutran perundangan yang berlaku.

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki tugas salah satunya yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

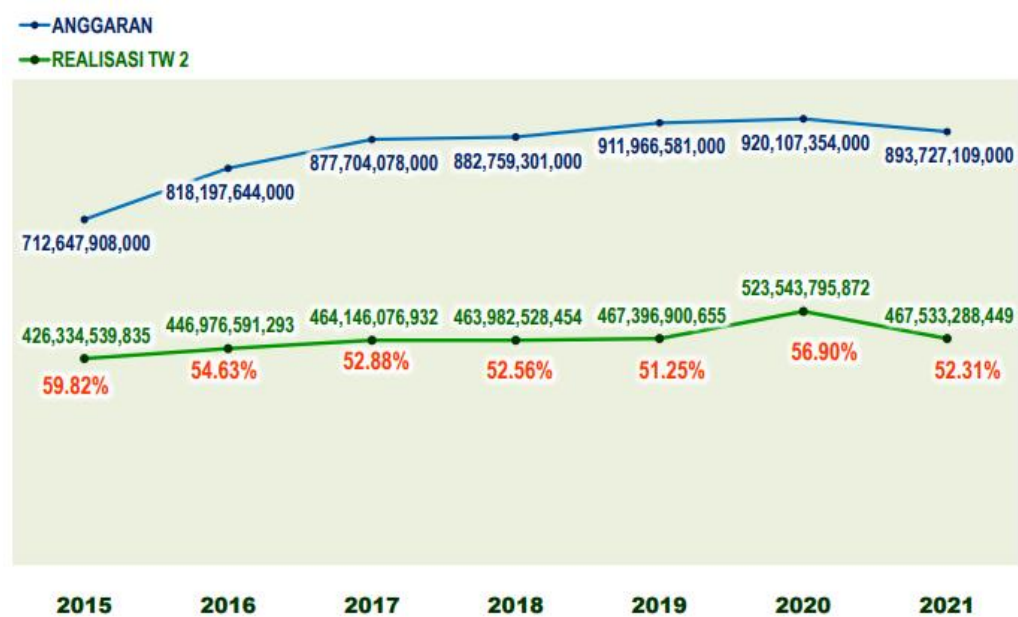
No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Belum terpenuhinya kualitas dokumen penganggaran daerah. Penyusunan dokumen penganggaran dianggap berkualitas ketika memenuhi asas tepat waktu dan konsisten. Namun masih ada dokumen yang belum tepat waktu penyampaian ke DPRD dan belum dapat memenuhi asas konsisten.	Melaksanakan peningkatan kualitas dokumen perencanaan dengan mematuhi dari setiap proses penganggaran dan memberikan sosialisasi kepada OPD untuk menjaga konsistensi dokumen penganggaran.
2.	Kurang efektifnya proses penatausahaan dan penyajian Laporan	Melaksanakan inovasi dan sosialisasi untuk

	Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Kota Magelang. Kurang efektifnya proses penatausahaan dan penyajian LKPD disebabkan OPD belum memiliki pemahaman yang sama mengenai standar penatausahaan dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Magelang. Hal ini akan menyebabkan adanya potensi penumpukan pertanggungjawaban di akhir tahun dan adanya potensi temuan atau rekomendasi dari BPK dikarenakan penyajian LKPD kurang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	meningkatkan efektivitas proses penatausahaan dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Magelang.
--	--	---

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan maupun pengelolaan pendapatan daerah di BPKAD Kota Magelang bisa dikatakan sudah on the track atau cukup baik. Hal ini didasarkan pada capaian realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang selalu bisa melampaui target sebesar 50%. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar diagram realisasi penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2015 hingga Triwulan II Tahun 2021 dibawah ini :

Gambar 2.3.1 Diagram Realisasi Pendapatan Daerah



Namun demikian di dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah ini agar terus berjalan baik dan meningkat tentu tidak lepas dari berbagai hambatan maupun resiko yang menyertainya. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Kurang optimalnya penerimaan PAD, di antaranya dikarenakan : - Masih ada kesenjangan antara potensi Wajib Pajak (WP) pada objek pajak tertentu dengan wajib pajak yang patuh membayar pajak - Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah). - Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan potensi pajak, sehingga sering ditemukan adanya tindakan illegal yang dapat mengurangi pemasukan PAD. - Kurang optimalnya penarikan pajak, retribusi serta sumber-sumber PAD yang lain dikarenakan dampak pandemic Covid-19.	- Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak. - Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak. - Melakukan inovasi-inovasi agar potensi pungutan pajak dan retribusi masih tetap bisa dilaksanakan dengan optimal terutama pada masa pandemi. Hal ini dimaksudkan Wajib Pajak (WP) dan petugas merasa aman, nyaman serta merasakan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi. - Memberikan relaksasi baik dari sisi besaran maupun waktu jatuh tempo pajak agar wajib pajak dan UMKM dapat konsentrasi untuk memulihkan usaha mereka - Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta melakukan monitoring

		baik dengan menggunakan TMD (Tax Monitoring Device) seperti penggunaan Tapping Box pada mesin kasir maupun peninjauan secara langsung agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menambah penggunaan TMD ke objek pajak yang potensial namun belum dipasang mesin TMD.
--	--	---

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Guna mewujudkan tertib administrasi dan juga pemanfaatan Barang Milik Daerah juga diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Belum optimalnya pemahaman pengelolaan aset/Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang yang terdapat di OPD-OPD.	Melakukan pembinaan, rekonsiliasi, dan asistensi secara kontinyu kepada Pengurus Barang di OPD-OPD.
2.	Kurang optimalnya pengadministrasian dan pemanfaatan asset milik Pemerintah Kota Magelang. Hal ini membawa pengaruh pada berkurangnya PAD yang bersumber dari pemanfaatan barang milik daerah.	Melaksanakan inovasi dan sosialisasi dalam rangka agar optimalisasi administrasi aset daerah dapat terlaksana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 masih dibayang-bayangi dampak pandemi Covid-19, terutama dari aspek pemulihan ekonomi lokal, regional maupun nasional. Pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan keuangan mengingat banyak agenda yang harus dilaksanakan untuk penanganan dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial, serta untuk pencapaian target-target indikator pembangunan daerah. Ketidaktepatan penentuan kebijakan keuangan akan berakibat tidak maksimalnya capaian indikator akhir pelaksanaan pembangunan tahun rencana.

RKPD Kota Magelang Tahun 2022 juga menjadi transisi secara perencanaan mengingat RPJMD Tahun 2021- 2026 masih dalam proses penyusunan pada saat RKPD Kota Magelang Tahun 2022 ini juga sedang dalam proses. Secara regulasi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 ditetapkan pada maksimal 6 bulan paska pelantikan Walikota-Wakil Walikota Magelang hasil Pilkada Tahun 2020. Dengan demikian maka RKPD Kota Magelang Tahun 2022 harus dapat diselaraskan dengan Visi-Misi Walikota yang baru atau jika tidak, perlu penyesuaian pada saat RPJMD ditetapkan, termasuk penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai PP nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat; dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya pencapaian pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk memberdayakan potensi daerah melalui:

1. Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (Fiscal Cadaster Policy);

- Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
- Penegakan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
- Peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (tax evasion);
- Perubahan regulasi yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
- Koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

Berdasarkan analisa kondisi perekonomian daerah, kebijakan ekonomi daerah, dan kebijakan pendapatan daerah, maka struktur pendapatan daerah Kota Magelang digambarkan sebagaimana tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.1.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2019	Persentase	Realisasi 2020	Persentase
1.1	Pendapatan Asli Daerah	273.534.023.000	28,27	290.756.816.510	30,73
1.1.1	Pajak daerah	40.432.693.000	14,78	35.958.686.531	12,37
1.1.2	Retribusi Daerah	6.942.060.743	2,54	5.319.316.332	1,83
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.098.845.504	3,33	9.217.035.218	3,17
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.060.420.293	79,36	240.261.778.429	82,63
1.2	Dana Perimbangan	574.099.278.956	59,32	525.575.219.057	55,55
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	19.159.017.863	3,34	28.425.592.273	5,41
1.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000	79,29	416.722.396.000	79,29
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.763.232.093	17,38	80.427.230.784	15,30
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	120.103.623.136	12,41	129.856.725.970	13,72
1.3.1	Hibah	18.556.798.966	15,45	19.563.703.991	15,07
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	49.597.892.921	41,30	47.989.055.670	36,96
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.393.139.000	35,30	57.423.984.000	44,22
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	8.655.271.000	7,21	4.312.563.600	3,32
1.3.6	Pendapatan Lainnya	887.521.249	0,74	567.414.309	0,44
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	967.736.925.271		915.808.120.634	

Memperhatikan realisasi pendapatan tahun 2019 dan tahun 2020, serta melihat situasi dan potensi ekonomi atas dampak Covid-19 baik secara lokal, regional maupun nasional yang mempengaruhi kinerja pendapatan daerah tahun 2020 maka target pendapatan tahun 2022 serta proyeksi pendapatan tahun 2022 dan prakiraan majunya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1.2
 Target Pendapatan Kota Magelang Tahun 2021serta Proyeksi Pendapatan Kota
 Magelang Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Target 2021	Persentase	Target 2022	Persentase	Target 2023	Persentase
1.1	Pendapatan Asli Daerah	212.850.446.000	23,82	217.264.020.000	24,46	234.262.700.000	25,25
1.1.1	Pajak daerah	32.597.000.000	15,31	33.979.000.000	15,64	35.938.192.000	15,34
1.1.2	Retribusi Daerah	4.913.993.000	2,31	5.364.708.000	2,47	5.012.763.000	2,14
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	10.214.013.000	4,80	7.050.995.000	3,25	11.260.948.000	4,81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.125.440.000	77,58	170.869.317.000	78,65	182.050.797.000	77,71
1.2	Pendapatan Transfer	664.705.463.000	74,37	653.146.564.000	73,55	676.870.438.000	72,96
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	590.481.263.000	88,83	596.069.364.000	91,26	625.910.498.000	92,47
1.2.2	Transfer Antar Daerah	74.224.200.000	11,17	57.077.200.000	8,74	50.959.940.000	7,53
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	16.171.200.000	1,81	17.603.690.000	1,98	16.652.112.000	1,79
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	16.171.200.000	100,00	17.603.690.000	100,00	16.652.112.000	100,00
1.3.2	Dana Darurat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	893.727.109.000		888.014.274..000		927.785.250.000	

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2021

2.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diamanatkan agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarnya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah secara makro terdiri atas :

- Belanja operasi Merupakan pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerinta daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- Belanja modal Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya.
- Belanja tidak terduga Merupakan pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa

Dalam menyusun Renja Tahun 2022, kebijakan belanja daerah yang diterapkan oleh BPKAD Kota Magelang adalah guna mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan sesuai yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Pemerintah Kota Magelang, yaitu sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah;
- b. Mengacu Standar Pelayanan Minimal;
- c. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- d. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan;
- e. Memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah;
- f. Mematuhi ketentuan penggunaan transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum.
- g. Mematuhi pelaksanaan penggunaan transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah;
- h. Mengupayakan Percepatan Pelaksanaan Belanja Daerah agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Daerah di Bank dalam jumlah tidak wajar;
- i. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP;
- j. Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
- k. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- l. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

m. Mengakomodasi antiasipasi kebutuhan akan penanganan dampak Covid-19 jika pandemi masih berlangsung.

Berdasarkan target pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah, maka struktur belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang digambarkan sebagaimana tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.2.1
Realisasi dan Persentase Belanja BPKAD Kota Magelang
Tahun 2019 – 2020

Belanja Daerah	Realisasi Anggaran 2019 (Rp)	(%) serapan anggaran	Realisasi Anggaran 2020 (Rp)	(%) serapan anggaran
Belanja Tidak Langsung	6.434.641.195	107,82	6.794.435.915	95,04
Belanja Pegawai	6.434.641.195	107,82	6.794.435.915	95,04
Belanja Langsung	17.791.328.637	97,70	11.231.884.031	67,26
Belanja Pegawai	7.792.536.000	104,03	6.342.536.000	98,02
Belanja Barang dan Jasa	7.121.098.361	92,00	4.650.141.911	92,65
Belanja Modal	2.877.694.276	96,56	239.206.120	4,59
JUMLAH BELANJA	24.225.969.832	92,98	18.026.319.946	75,58

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target RPJMD dalam perencanaan target belanja daerah tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 serta prakiraan majunya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.2.2
Target Belanja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI	14,842,057,000	15,083,012,000	16,021,953,500
	Belanja Pegawai	9,056,952,000	9,660,340,000	8,707,234,200
	Belanja Barang dan Jasa	5,665,105,000	5,422,672,000	7,314,719,300
	Belanja Hibah	120,000,000	0	0
2.2	BELANJA MODAL	15,194,000,000	294,000,000	294,000,000
	Belanja Modal Tanah	15,000,000,000	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	100,000,000	100,000,000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	194,000,000	194,000,000	194,000,000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30,000,000,000	15,500,000,000	32,000,000,000
	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000	15,500,000,000	32,000,000,000
	Jumlah Belanja	60,036,057,000	30,877,012,000	48,315,953,500

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang sudah tercantum semua dalam rancangan awal RKPD Kota Magelang Tahun 2022 sesuai tabel 2.4.2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.4.2.3
Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Magelang

OPD : BPKAD Kota Magelang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan oleh OPD					
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				35,015,973,000.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				30,877,012,000.00	
	KEUANGAN				35,015,973,000.00	KEUANGAN				30,877,012,000.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang	96.67	10,864,637,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan	96.67	11,240,118,000.00	

			Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. (%)					BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. (%)			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (%)	100	33.506.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (%)	100	34.506.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)</i>	2,00	5.586.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)</i>	2,00	6.586.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	3.681.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	3.681.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	3.415.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	3.415.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	4.055.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	4.055.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	4.049.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	1,00	4.049.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (Laporan)</i>	3,00	12.720.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (Laporan)</i>	3,00	12.720.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)</i>	100	8.373.329.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)</i>	100	8.916.211.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (dalam 1 tahun) (Orang)</i>	55,00	8.292.604.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (dalam 1 tahun) (Orang)</i>	55,00	8.841.960.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (Laporan)</i>	24	15.667.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (Laporan)</i>	0,00	15.667.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun (Laporan)</i>	18	65.058.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun (Laporan)</i>	2,00	58.584.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan (%)</i>	100	39.947.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan (%)</i>	100	0	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (Kegiatan)</i>	2	39.947.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (Kegiatan)</i>	2	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah (%)</i>	100	229.327.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah (%)</i>	100	174.877.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya (Ruangan)</i>	35	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya (Ruangan)</i>	35	6.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Buah)</i>	1,00	54.450.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Buah)</i>	1,00	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian (Orang)</i>	80	15.464.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian (Orang)</i>	80	15.464.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dan jenis barang yang dicetak (jenis)</i>		13.530.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dan jenis barang yang dicetak (jenis)</i>		13.530.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)</i>	3,00	5.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>	3,00	5.400.000,00	

								(Jenis)			
	Penyediaan Bahan/Material	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan (jenis)	22,00	6.955.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan (jenis)	22,00	6.955.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)	40,00	21.576.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)	40,00	21.576.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	40,00	105.952.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	40,00	105.952.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	576.283.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	560.643.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah surat yang dikelola (Surat)	2.000	79.804.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah surat yang dikelola (Surat)	2.000	81.587.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (Jenis)	5,00	365.124.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (Jenis)	5,00	365.124.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	8,00	131.355.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	8,00	113.932.000,00	

			(dalam 1 tahun) (orang)					(dalam 1 tahun) (orang)			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	80	1.612.245.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	85	1.553.881.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara (unit)	24,00	211.616.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara (unit)	24,00	211.616.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (Unit)	63,00	389.551.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (Unit)	63,00	382.973.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)	16,00	70.306.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)	16,00	70.306.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara (Unit)	3,00	144.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara (Unit)	3,00	144.000.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitas (Unit)	12,00	796.772.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitas (Unit)	12,00	744.986.000,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	85,33	11,030,071,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)		16,542,435,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas penganggaran daerah (%)	90	483.826.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas penganggaran daerah (%)	95	490.098.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen KUA dan PPAS tahun 2023 (dokumen)	2	54.937.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen KUA dan PPAS tahun 2023 (dokumen)	2	54.937.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 (dokumen)	2	48.576.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 (dokumen)	2	48.576.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023 (dokumen)	28	48.125.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023 (dokumen)	28	48.125.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen RKPA SKPD (dokumen)	28	44.569.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah dokumen RKPA SKPD (dokumen)	2	44.569.000,00	

	RKA-SKPD					RKA-SKPD					
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah DPA SKPD Tahun 2023 (dokumen)</i>	28	12.789.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah DPA SKPD Tahun 2023 (dokumen)</i>	28	12.789.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah DPPA SKPD tahun 2022 (dokumen)</i>	28	10.438.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah DPPA SKPD tahun 2022 (dokumen)</i>	28	10.438.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023 (dokumen)</i>	2,00	143.402.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023 (dokumen)</i>	2,00	149.674.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 (dokumen)</i>	2	120.990.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 (dokumen)</i>	2	120.990.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)</i>	80	233.394.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)</i>	85	239.394.000,00	

	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (dokumen)</i>	112	10.560.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (dokumen)</i>	112	10.560.000,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah (laporan)</i>	12	14.314.000,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah (laporan)</i>	12	14.314.000,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (laporan)</i>	16	14.650.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (laporan)</i>	16	14.650.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>berita acara rekonsiliasi data pajak (dokumen)</i>	2	37.841.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>berita acara rekonsiliasi data pajak (dokumen)</i>	2	43.841.000,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan aliran kas (laporan)</i>	12	129.499.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan aliran kas (laporan)</i>	12	129.499.000,00	

	Terkait					Terkait					
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	1	26.530.000,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	1	26.530.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	86	312.851.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	89.28	312.943.000,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Berita Acara hasil rekonsiliasi (dokumen)</i>	103	42.279.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Berita Acara hasil rekonsiliasi (dokumen)</i>	103	39.043.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan konsolidasi bulanan (laporan)</i>	12	37.015.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan konsolidasi bulanan (laporan)</i>	12	33.779.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran</i>	2	102.426.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan</i>	2	102.426.000,00	

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		<i>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)</i>			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		<i>APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)</i>			
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan prognosis (laporan)</i>	1	16.794.000,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>jumlah laporan prognosis (laporan)</i>	1	16.794.000,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperwal tentang Bagan Akun Standar (dokumen)</i>	1	42.593.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperwal tentang Bagan Akun Standar (dokumen)</i>	1	39.357.000,00	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi (dokumen)</i>	1	9.767.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi (dokumen)</i>	1	9.767.000,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan pembinaan (laporan)</i>	4	61.977.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan pembinaan (laporan)</i>	4	71.777.000,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>	100	10.000.000.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan</i>	100	15.500.000.000,00	

			(%)					ketentuan yang berlaku			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	100,00	10.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	100,00	15.500.000.000,00	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	83	11,272,426,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>		1,258,005,000.00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	83	11.272.426.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	83	1.258.005.000,00	
	Penyusunan Standar Harga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya (dokumen)</i>	2	37.655.000,00	Penyusunan Standar Harga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya (dokumen)</i>	2	37.655.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)</i>	7	28.618.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)</i>	7	28.618.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	1	196.901.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	1	183.954.000,00	

	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen inventarisasi BMD (dokumen)</i>	<i>1</i>	58.756.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen inventarisasi BMD (dokumen)</i>	<i>1</i>	58.756.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja (Lokasi)</i>	<i>1</i>	10.383.872.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja (Lokasi)</i>	<i>1</i>	383.872.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>6</i>	300.575.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>6</i>	300.575.000,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>7</i>	74.804.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>7</i>	74.804.000,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>14</i>	152.020.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>14</i>	145.546.000,00	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>4</i>	39.225.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	<i>4</i>	44.225.000,00	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)</i>	<i>24</i>	1,848,839,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)</i>		1,836,454,000.00	

	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)</i>	100	1.848.839.000,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)</i>	100	1.836.454.000,00	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah (laporan)</i>	1,00	1.190.482.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah (laporan)</i>	1,00	1.174.297.000,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah (laporan)</i>	4	18.284.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah (laporan)</i>	4	22.084.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Peta digitasi PBB yang terupdate (peta)</i>	17	82.362.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Peta digitasi PBB yang terupdate (peta)</i>	17	82.362.000,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Penilaian PBBP2 (laporan)</i>	20	31.958.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Penilaian PBBP2 (laporan)</i>	15	31.958.000,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>berkas SPPT PBBP2 (berkas)</i>	36.000	71.717.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>berkas SPPT PBBP2 (berkas)</i>	36.200	71.717.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Realisasi Jenis Pajak (laporan)</i>	12	9.898.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Realisasi Jenis Pajak (laporan)</i>	12	9.898.000,00	

	Penagihan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis laporan (jenis)</i>	8	348.034.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jenis laporan (jenis)</i>	8	348.034.000,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan tunggakan Wajib Pajak (laporan)</i>	12	18.710.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan tunggakan Wajib Pajak (laporan)</i>	12	18.710.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi (dokumen)</i>	3,00	77.394.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi (dokumen)</i>	3,00	77.394.000,00	
					35.015.973.000,00					30.877.012.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep *money follow programme priority*. Beberapa fenomena seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 juga memiliki imbas yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang.

Resesi ekonomi dunia dan imbas pandemi yang menghantam Indonesia sejak awal tahun 2020 melahirkan beberapa respon kebijakan adaptif pada skala nasional sampai level daerah. Perlambatan perekonomian sudah mulai dirasakan pada Triwulan I 2020 dimana pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai 2,97 persen. Kontraksi terus berlangsung sampai dengan akhir tahun. Data BPS mengungkapkan sampai dengan Triwulan III 2020 perekonomian nasional berkontraksi -3,49 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Sampai akhir tahun 2020 secara perlahan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik meski masih terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen. Perlambatan Dampak pandemi juga mulai terlihat dengan meningkatnya persentase penduduk miskin di Maret 2020 menjadi pada angka 9,78 persen.

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Makro Nasional, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,07	5,17	5,02*	-2,07**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07	Agust 2020
IPM (%)	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	
Indeks Gini	0,397	0,393	0,389	0,382	0,381	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	Maret 2020

Sumber: BPS, 2021
 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Dampak pandemi mulai dirasakan di Jawa Tengah sejak Triwulan I 2020 dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi jawa Tengah di angka 2,6 persen. Kontraksi terjadi di Triwulan III dengan pertumbuhan sebesar -3,93 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan kontraksi Triwulan II 2020 yang mencapai -5,92 persen. dialami hampir seluruh lapangan usaha. Pada akhir tahun tercatat kontraksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin mulai dirasakan di Maret 2020 yang naik sebesar 0,61 poin menjadi sebesar 11,41 persen.

Tabel 3.1.2
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,27	5,32	5,41*	-2,65**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,57	4,51	4,49	6,48	Agust 2020
IPM	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	
Inflasi (%)	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56	
Rasio Gini (Maret)	0,366	0,365	0,378	0,361	0,362	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41	Maret 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Identifikasi Isu-isu Strategis Pelayanan OPD

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
1.	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Belum optimalnya sistem pajak online
2.	Tata kelola dan reformasi birokrasi	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan yaitu denda pajak bagi WP yang menunggak pembayaran pajaknya
3.	Keuangan Negara	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar tanpa Pengecualian	Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB) perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
4.	Keuangan Negara	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dampak pandemi Covid-19 masih tetap menjadi perhatian serius dalam rencana pembangunan tahun 2022, karena masa akhir pandemi yang belum dapat diperkirakan, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang antara lain menyebutkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 secara nyata mengganggu aktivitas ekonomi dengan pengaruhnya melumpuhkan kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi;
2. Respon kebijakan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi resiko pandemi untuk peningkatan belanja kesehatan, dan menjaga aktifitas usaha, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat;
3. Langkah langkah harus diambil guna mengatasi kondisi dampak pandemi dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan ekonomi dan dunia usaha terdampak.

Visi Misi Wali Kota Magelang Terpilih 2021-2024

Visi Misi Walikota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026, dan harus sudah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2022. Visi misi Walikota dengan periode jabatan 2021-2024 adalah:

"KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"

Penjelasan makna unsur VISI dan upaya perwujudannya ditempuh melalui MISI untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan pembangunannya. Visi dan 5 (lima) misi dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Maju	Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
Sehat	Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta lingkungan yang sehat.
Bahagia	Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang bahagia ditandai dengan keadaan masyarakat Kota Magelang yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diterjemahkan ke dalam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran dan berlandaskan imtaq;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan; dan
5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan tata ruang dan infrastruktur.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Renja Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang yang akan diwujudkan ditunjukkan pada Tabel 3.3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.			
	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif			

		Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	88,15
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90,58%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	85,71%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk unsur penunjang urusan pemerintahan. Secara terperinci indikator Program beserta targetnya pada Renja 2022 BPKAD Kota Magelang yang mendukung visi dan misi Walikota Magelang serta prioritas dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Program

NO	PRIORITAS RKPD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Pengembangan inovasi daerah untuk kematangan smart city	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran	97,33%
			Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan	80%
			Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100%

		Program Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD terhadap Potensi PAD	85%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola	68,35%

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana yang tersaji dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) program dan 12 (dua belas), dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan atau berkurang 3 (tiga) sub kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang sejumlah 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 akan efektif apabila ditopang dengan efektifitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Guna meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mulai berlaku untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021, sehingga dokumen Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2022 akan mengimplementasikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Demikian pula untuk nomenklatur di Renja 2022 mengalami perubahan sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 yaitu terdiri dari 4 (empat) program yang terbagi dalam 1 (satu) program yang ada di setiap perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta program-program sesuai urusan yang menjadi

tanggung jawab setiap perangkat daerah masing-masing sebanyak 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Total pagu indikatif / kebutuhan dana dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk Tahun 2022 sebesar Rp.30.877.012.000,- dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD. Berikut disampaikan rincian keempat program tersebut:

1. Program yang ada di setiap perangkat daerah, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 11.240.118.000,-
2. Program yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah sesuai urusannya, yaitu:
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 16.542.435.000,-
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.258.005.000;
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.836.454.000,00

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Magelang

KODE	Program / Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	TARGET 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				30.877.012.000,00				48,021,953,500.00
5.02	KEUANGAN				30.877.012.000,00				48,021,953,500.00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. (%)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	97	11,240,118,000.00				11,643,572,600.00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	34.506.000,00	Dana Alokasi Umum		100	36,231,300.00

		(%)							
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	6.586.000,00	Dana Alokasi Umum		2,00	6,915,300.00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	3.681.000,00	Dana Alokasi Umum		1,00	3,865,050.00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	3.415.000,00	Dana Alokasi Umum		1,00	3,585,750.00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	4.055.000,00	Dana Alokasi Umum		1,00	4,257,750.00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	4.049.000,00	Dana Alokasi Umum		1,00	4,251,450.00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	12.720.000,00	Dana Alokasi Umum		3,00	13,356,000.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	8.916.211.000,00	Dana Alokasi Umum		100	8,784,212,850.00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya (dalam 1 tahun) (Orang)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	55,00	8.841.960.000,00	Dana Alokasi Umum		55,00	8,707,234,200.00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	<i>Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24	15.667.000,00	Dana Alokasi Umum		0,00	16,450,350.00

	Kuangan SKPD	(Laporan)							
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun (Laporan)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18	58.584.000,00	Dana Alokasi Umum		2,00	60,528,300.00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan (%)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	-	Dana Alokasi Umum		-	39,947,000.00
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (Kegiatan)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	-	Dana Alokasi Umum		-	39,947,000.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah (%)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	174.877.000,00			100	213,836,250.00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya (Ruangan)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		35	6,300,000.00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Buah)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	-	Dana Alokasi Umum		1,00	1,500,000.00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian (Orang)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80	15.464.000,00	Dana Alokasi Umum		80	16,237,200.00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang dicetak (jenis)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15	13.530.000,00	Dana Alokasi Umum			14,206,500.00

5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	5.400.000,00			3,00	5,670,000.00
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22,00	6.955.000,00	Dana Alokasi Umum		22,00	7,302,750.00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40,00	21.576.000,00	Dana Alokasi Umum		40,00	22,654,800.00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40,00	105.952.000,00	Dana Alokasi Umum		40,00	139,965,000.00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	560.643.000,00	Dana Alokasi Umum		100	580,594,350.00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah surat yang dikelola (Surat)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.100	81.587.000,00	Dana Alokasi Umum		2.000	79,902,900.00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (Jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,00	365.124.000,00	Dana Alokasi Umum		5,00	383,380,200.00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya (dalam 1 tahun) (orang)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4,00	113.932.000,00	Dana Alokasi Umum		8,00	117,311,250.00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	1.553.881.000,00	Dana Alokasi Umum		85	1,622,813,850.00

		(%)							
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara (unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24,00	211.616.000,00			24,00	222,196,800.00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	63,00	382.973.000,00	Dana Alokasi Umum		63,00	401,245,950.00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16,00	70.306.000,00	Dana Alokasi Umum		16,00	73,821,300.00
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	144.000.000,00	Dana Alokasi Umum		3,00	151,200,000.00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitas (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12,00	744.986.000,00	Dana Alokasi Umum		12,00	774,349,800.00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90,58%	16,542,435,000.00	Dana Alokasi Umum			33,075,150,650.00

5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Presentase Penganggaran sesuai ketentuan (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	97,33	490.098.000,00	Dana Alokasi Umum		95	508,017,300.00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<i>jumlah dokumen KUA dan PPAS tahun 2023 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	54.937.000,00	Dana Alokasi Umum		2	57,683,850.00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	48.576.000,00	Dana Alokasi Umum		2	51,004,800.00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	<i>jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	48.125.000,00	Dana Alokasi Umum		28	50,531,250.00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	<i>jumlah dokumen RKPA SKPD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	44.569.000,00	Dana Alokasi Umum		2	46,797,450.00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2,00	149.674.000,00	Dana Alokasi Umum		2,00	150,572,100.00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	120.990.000,00	Dana Alokasi Umum		2	127,039,500.00

5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80	239.394.000,00	Dana Alokasi Umum		85	220,675,350.00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	<i>jumlah DPA SKPD Tahun 2023 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	12.789.000,00	Dana Alokasi Umum		28	13,428,450.00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	<i>jumlah DPPA SKPD tahun 2022 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28	10.438.000,00	Dana Alokasi Umum		28	10,959,900.00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	112	10.560.000,00	Dana Alokasi Umum		112	11,088,000.00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	<i>jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	14.314.000,00	Dana Alokasi Umum		12	15,029,700.00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16	14.650.000,00	Dana Alokasi Umum		16	15,382,500.00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	<i>berita acara rekonsiliasi data pajak (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	43.841.000,00	Dana Alokasi Umum		2	39,733,050.00

	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>laporan aliran kas (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	129.499.000,00	Dana Alokasi Umum		12	135,973,950.00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	26.530.000,00	Dana Alokasi Umum		1	27,856,500.00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	312.943.000,00	Dana Alokasi Umum		89.28	322,069,650.00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Berita Acara hasil rekonsiliasi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103	39.043.000,00	Dana Alokasi Umum		103	40,501,650.00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	<i>jumlah laporan konsolidasi bulanan (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	33.779.000,00	Dana Alokasi Umum		12	34,974,450.00

	Pemerintah Daerah								
5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	102.426.000,00	Dana Alokasi Umum		2	107,547,300.00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>jumlah laporan prognosis (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	16.794.000,00	Dana Alokasi Umum		1	17,633,700.00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Raperwal tentang Bagan Akun Standar (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	39.357.000,00	Dana Alokasi Umum		1	40,831,350.00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Raperwal tentang Kebijakan Akuntansi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	9.767.000,00	Dana Alokasi Umum		1	10,255,350.00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	<i>laporan pembinaan (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	71.777.000,00	Dana Alokasi Umum		4	70,325,850.00

	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	32.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100	32,000,000,000.00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100,00	32.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100,00	32,000,000,000.00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83	1,258,005,000.00	Dana Alokasi Umum			2,437,624,350.00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83	1.258.005.000,00	Dana Alokasi Umum		83	1,317,949,500.00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	37.655.000,00	Dana Alokasi Umum		2	39,537,750.00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	28.618.000,00	Dana Alokasi Umum		7	30,048,900.00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	183.954.000,00			1	191,180,850.00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	<i>Jumlah dokumen inventarisasi BMD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	58.756.000,00	Dana Alokasi Umum		1	61,693,800.00

5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja (Lokasi)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	383.872.000,00	Dana Alokasi Umum		1	403,065,600.00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6	300.575.000,00	Dana Alokasi Umum		6	315,603,750.00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	74.804.000,00	Dana Alokasi Umum		7	78,544,200.00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	<i>Laporan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	145.546.000,00	Dana Alokasi Umum		14	151,838,400.00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	44.225.000,00	Dana Alokasi Umum		4	46,436,250.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase penerimaan PAD terhadap potensi PAD (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37,5	1.778.494.000,00	Dana Alokasi Umum			1,985,280,750.00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	<i>Cakupan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	1.778.494.000,00	Dana Alokasi Umum		100	1,985,280,750.00
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	<i>Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,00	1.174.297.000,00	Dana Alokasi Umum		1,00	1,230,549,600.00

5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	22.084.000,00	Dana Alokasi Umum		4	23,188,200.00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Peta digitasi PBB yang terupdate (peta)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17	82.362.000,00	Dana Alokasi Umum		17	86,480,100.00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Laporan Penilaian PBBP2 (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20	31.958.000,00	Dana Alokasi Umum		15	33,555,900.00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>berkas SPPT PBBP2 (berkas)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.500	71.717.000,00	Dana Alokasi Umum		36.200	79,302,850.00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Laporan Realisasi Jenis Pajak (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	9.898.000,00	Dana Alokasi Umum		12	10,392,900.00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	<i>Jenis laporan (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	348.034.000,00	Dana Alokasi Umum		8	365,435,700.00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Laporan tunggakan Wajib Pajak (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	18.710.000,00	Dana Alokasi Umum		12	118,645,500.00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,00	77.394.000,00	Dana Alokasi Umum		3,00	37,730,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2022 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	K O D E	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARG ET 202 2	PAGU INDI KATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDI KATI F (Rp)	
											NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						30,877,012,000.00							-	
	5.02	KEUANGAN						30,877,012,000.00								

1	5.02.5-2.0-0.0-0.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan. (%)				96.67	11,240,118,000.00			Tidak	Tidak			11,592,922,000.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (%)				100	34.506.000,00	(-, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak		100	35.179.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)				1,00	6.586.000,00	(-, KOTA MAGELANG)					2,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (Dokumen)				1,00	3.681.000,00	(-, KOTA MAGELANG)					1,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)				1,00	3.415.000,00	(-, KOTA MAGELANG)					1,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)				1,00	4.055.000,00	(-, KOTA MAGELANG)					1,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 1.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)				1,00	4.049.000,00	(-, KOTA MAGELANG)					1,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (Laporan)				3,00	12.720.000,00	(-, KOTA MAGELANG)					3,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)				100	8.916.211.000,00	(-, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak		100	9.146.147.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (dalam 1 tahun) (Orang)				55,00	8.841.960.000,00	(Jl. jend sarwo edie wibowo no 2, KOTA MAGELANG)					55,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (Laporan)				24	15.667.000,00	(KOTA MAGELANG)					0,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun (Laporan)				18	58.584.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)					2,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan (%)				100	0	(-, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak		100	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 1.2.06	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (Kegiatan)				2	0	(-, KOTA MAGELANG)					2	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah (%)				100	174.877.000,00	(-, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak			100	277.873.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya (Ruangan)				35	6.000.000,00	(jl. jend sarwo edi wibowo no.2, KOTA MAGELANG)					35	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Buah)				1,00	0	(jl. jend sarwo edi wibowo no.2, KOTA MAGELANG)					1,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN yang disediakan makan minum harian (Orang)				80	15.464.000,00	(jl. jend sarwo edi wibowo no.2, KOTA MAGELANG)					80	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (Jenis)				1		(-, KOTA MAGELANG)					1	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang dicetak (jenis)				15,00	13.530.000,00	(jl. jend sarwo edi wibowo no.2)					15,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 1.2.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)				3,00	5.400.000,00	(Jl. Jend Sarwo edi wibowo no.2, KOTA MAGELANG)					3,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan (jenis)				22,00	6.955.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)					22,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)				40,00	21.576.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)					40,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)				40,00	105.952.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)					40,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan (Kegiatan)				15,00		(-, KOTA MAGELANG)					20,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100	560.643.000,00	(-, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak		100	519.721.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola (Surat)				2,00	81.587.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor, KOTA MAGELANG)					2,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 1.2.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (Jenis)				5,00	365.124.000,00	(Jl. Jend Sarwo edi wibowo no.2, KOTA MAGELANG)					5,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan (dalam 1 tahun) (orang)				8,00	113.932.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Magelang Selatan)					8	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				80	1.553.881.000,00	(-, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak			85	1.614.002.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara (unit)				24,00	211.616.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)					24,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (Buah)				24		(-, KOTA MAGELANG)					24		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara (Unit)				63,00	382.973.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)					63,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (buah)				63		(-, KOTA MAGELANG)					63		
		Jumlah perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbit				6							6		

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 (dokumen)				2	48.576.000,00	(KOTA MAGELANG)					2	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2023 (dokumen)				28	48.125.000,00	(KOTA MAGELANG)					28	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKPA SKPD (dokumen)				28	44.569.000,00	(KOTA MAGELANG)					2	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah DPA SKPD Tahun 2023 (dokumen)				28	12.789.000,00	(KOTA MAGELANG)					28	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah DPPA SKPD tahun 2022 (dokumen)				28	10.438.000,00	(KOTA MAGELANG)					28	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						149.674.000,00							-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2023 (dokumen)				2,00		(KOTA MAGELANG)					2,00		

5.02.5-2.0-
0.0-0.04.0
2.2.02

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 (dokumen)				2	120.990.000,00	(KOTA MAGELANG)					2	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)				80	239.394.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak			85	249.583.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD (dokumen)				112	10.560.000,00	(KOTA MAGELANG)					112	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah (laporan)				12	14.314.000,00	(KOTA MAGELANG)					12	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (laporan)				16	14.650.000,00	(KOTA MAGELANG)					16	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	berita acara rekonsiliasi data pajak (dokumen)				2	43.841.000,00	(KOTA MAGELANG)					2	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 2.2.03	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>laporan aliran kas (laporan)</i>			12	129.499.000,00	(KOTA MAGELANG)				12	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					26.530.000,00						-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		<i>Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>			1		(KOTA MAGELANG)				1		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>			86	312.943.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak		89.28	338.695.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Berita Acara hasil rekonsiliasi (dokumen)</i>			103	39.043.000,00	(KOTA MAGELANG)				103	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>jumlah laporan konsolidasi bulanan (laporan)</i>			12	33.779.000,00	(KOTA MAGELANG)				12	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 2.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2	102.426.000,00	(KOTA MAGELANG)					2	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1	16.794.000,00	(KOTA MAGELANG)					1	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1	39.357.000,00	(KOTA MAGELANG)					1	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1	9.767.000,00	(KOTA MAGELANG)					1	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				4	71.777.000,00	(KOTA MAGELANG)					4	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					15.500.000.000,00			Tidak	Tidak			10.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3	5.02.5-2.0-0.0-0.04.03		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)				100		(-, KOTA MAGELANG)				100		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)				100,00	15.500.000.000,00	(-, KOTA MAGELANG)				100,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)				83	1,258,005,000.00			Tidak	Tidak		1.349.190.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)				83	1.258.005.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak	83	1.349.190.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya (dokumen)				2	37.655.000,00	(-, KOTA MAGELANG)				2	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dokumen)				7	28.618.000,00	(KOTA MAGELANG)				7	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)				1	183.954.000,00	(-, KOTA MAGELANG)				1	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD (dokumen)				1	58.756.000,00	(-, KOTA MAGELANG)					1	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah untuk bangunan tempat kerja (Lokasi)				1	383.872.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Magelang, KOTA MAGELANG)					1	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)				6	300.575.000,00	(KOTA MAGELANG)					6	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan kegiatan usulan penjualan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)				7	74.804.000,00	(KOTA MAGELANG)					7	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah (laporan)				14	145.546.000,00	(KOTA MAGELANG)					14	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)				4	44.225.000,00	(KOTA MAGELANG)					4	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4	5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)</i>				24	1,836,454,000.00			Tidak	Tidak		1.866.103.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.5-2.0-0.0-0.04.0 4.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	<i>Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)</i>				100	1.836.454.000,00	(Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak	100	1.866.103.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	<i>Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah (laporan)</i>				1,00	1.174.297.000,00	(KOTA MAGELANG)				1,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah (laporan)</i>				4	22.084.000,00	(KOTA MAGELANG)				4	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Peta digitasi PBB yang terupdate (peta)</i>				17	82.362.000,00	(KOTA MAGELANG)				17	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Laporan Penilaian PBBP2 (laporan)</i> <i>dokumen BPHTB yang tervalidasi (dokumen)</i>				20 800	31.958.000,00	(KOTA MAGELANG) (KOTA MAGELANG)				15 750	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

		Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>berkas SPPT PBBP2 (berkas)</i>				36.000	71.717.000,00	(KOTA MAGELANG)					36.200	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Laporan Realisasi Jenis Pajak (laporan)</i>				12	9.898.000,00	(KOTA MAGELANG)					12	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penagihan Pajak Daerah	<i>Jenis laporan (jenis)</i>				8	348.034.000,00	(KOTA MAGELANG)					8	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Laporan tunggakan Wajib Pajak (laporan)</i>				12	18.710.000,00	(KOTA MAGELANG)					12	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi (dokumen)</i>				3,00	77.394.000,00						3,00	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah						30.877.012.000,00							25.914.182.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022. Tujuan penyusunan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 serta mengacu pada perencanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2022, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Dengan demikian maka dokumen Renja BPKAD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi BPKAD Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai fungsinya, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Renja BPKAD Kota Magelang tahun 2022 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan bidang tahun 2021 sehingga akan menjadi landasan setiap bidang dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2022 dilaksanakan dengan koordinasi antar bidang di lingkungan BPKAD Kota Magelang sehingga menghasilkan kesepakatan terutama

sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2022.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2021, muncul isu global yang berpengaruh sampai tingkat nasional, dan regional dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID) -19 yang berdampak pada situasi ekonomi dan sosial serta penurunan kemampuan keuangan daerah yang antara lain dikarenakan penurunan dana transfer dari Pusat dan penurunan pendapatan asli daerah. Memperhatikan hal tersebut maka fokus pelayanan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian pokok dalam penyusunan rencana kerja di tahun 2022. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dokumen Renja BPKAD Kota Magelang 2022 menjadi acuan resmi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022, maka kaidah pelaksanaannya adalah mempedomani penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Renja ini disusun dengan mengikuti regulasi baru dalam penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Demikian agar dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Magelang secara bertahap di tahun kedua periode RPJMD Kota Magelang 2021 – 2026.

Magelang, Agustus 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE

NIP. 19731014 199903 1 004